

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdesain deskriptif kualitatif dengan pola Penelitian Lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Obi, Kebupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para petani Cengkeh di Kecamatan Obi. (2) penyelesaian masalah dalam perjanjian bagi hasil oleh masyarakat Obi. (3) Untuk memperoleh gambaran penyesuaian mengenai konsep bagi hasil syariah pada petani Cengkeh di Kecamatan Obi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber data. Kemudian data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data direduksi, disajikan, dan diverifikasi untuk penarikan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Penyelesaian masalah perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Obi biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari kepala Desa. (2) Perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh di Kecamatan Obi, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (hukum adat). Perjanjian hanya secara lisan, dan hanya berdasarkan atas dasar kepercayaan. Bentuk perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh di Kecamatan Obi, dikenal dengan istilah “*bagi dua*” (Bagi Sama) 50:50. Ukuran yang digunakan untuk mengukur pembagian hasil panen cengkeh yaitu menggunakan timbangan, dan bekas kaleng susu atau disebut dalam bahasa setempat “*cupa*”. (3) Praktek pelaksanaan pengupahan buruh petik cengkeh dengan sistem bagi hasil 50: 50 yang terjadi di kecamatan Obi ini apabila dilihat serta dianalisis dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, *Urf* dan masalah tentang sistem pengupahan buruh petik cengkeh baik dari wacana keadilan maupun dari sistem pengupahannya, maka sistem upah buruh petik cengkeh di Kecamatan Obi dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sistem upah tersebut sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Perjanjian bagi hasil pertanian, Perjanjian bagi hasil pada petani Cengkeh, hukum Islam tentang kerjasama pertanian.

Abstract

This research uses qualitative descriptive designed qualitative nethod with Field Research system. This research is tocated in subdistrict of Obi, Regeney of South Halmahera, Province of Worth Moluccas. The purposes of this research are : (1) To understand the imp lamentation of yuld proportion system done by clove peasants in subdistrict of Obi : (2) Problem solving in the engagement of yield proportion implemented by community of Oby (3) To attain the adjustment of desription about Sharia yield of proportion concept on clove peasant on subdistrict of Oby.

Data used in this research are primary and secondary data. Primary data is attained from interview, observation, and documentation. secondary data is attained from documentation. The validity of data which are attained tested using data reseurec triangulation. Then data are reduced, presented, and verified for conclusion and to answer the research question.

The conclusions of this research are : (1) Problem solving of engagement of yield proportion in subdistrict of Obi usually solved by discussion on deliberation method whichis is done between people who involved without intervention of Chief of the village. (2) angagement of yield proportion between clove peasants in subdistrict of Obi is still based on local custom (traditional law). Engagement is only spoken, and based on realiance. The form of engagement og yield proportion between clove peasants in subdistrict of Obi is known as 50 : 50 (fifty - fifty) proportion. Measurement used to measure yield proportion of clove crops is weights, and reused – tincan or named as “ cupa ” in local native language. (3) The practice of clove – harvest worker’s wages implementation with 50 : 50 system in subdistrict of Obi if it’s seen and analyzed by focusing on norms in Islamic law which is based on Qur’ an, Hadist, Urf and pronlem on wage system, then clove – harvest worker’s wage system in subdistrict of Obi can be categorized as legal and justified as truc, with consideration that the wage system is legal according to Islamic law.

Keywords : Engagement of agricultural yield proportion, Engagement of yield proportion between clove peasants, Islamic law on agricultural coopertation